



Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi: Peran Karakteristik Keuangan Daerah dan Temuan Audit BPK Tahun 2023-2024

Andico ^{1*}, Andita Sulistyowati ¹

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author's email: andico20220400011@sibermu.ac.id

Artikel Info

Direvisi, 29/06/2025

Diterima, 02/08/2026

Dipublikasi, 06/08/2026

Kata Kunci:

Kinerja Pemerintah Daerah, Karakteristik Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Temuan Audit BPK, EKPPD

Keywords:

Regional Government Performance, Regional Government Characteristics, Capital Expenditure, BPK Audit Findings, EKPPD

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengkaji dampak atribut pemerintah daerah, seperti ukuran, kekayaan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2023–2024. Riset ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah, Laporan Audit BPK (LHP), dan skor Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD). Sampel riset dibentuk melalui purposive sampling, menghasilkan 68 titik data observasi dari 34 provinsi selama periode 2023–2024 yang memenuhi kriteria kelengkapan. Data dari tahun 2025 dikecualikan karena laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil audit BPK seringkali baru diberikan setelah bulan Maret tahun berikutnya, sehingga data tersebut tidak tersedia sepanjang periode riset. Riset ini menggunakan regresi linier berganda sebagai teknik analisis. Hasil riset menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah daerah berkorelasi dengan peningkatan kinerja tata kelola. Riset ini menawarkan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi sektor publik dan berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja.

Abstract

This research aims to examine the impact of local government attributes, such as size, regional wealth, dependence on the central government, capital expenditure, and audit results from the State Audit Agency (BPK), on the performance of provincial governments in Indonesia during 2023–2024. This research uses a quantitative methodology by utilizing secondary data sourced from local government financial statements, BPK Audit Report (LHP), and Local Government Performance Evaluation (EKPPD) scores. The research sample was formed through purposive sampling, resulting in 68 observation data points from 34 provinces during the 2023–2024 period that met the completeness criteria. Data from 2025 are excluded because local government financial statements and BPK audit results are often only provided after March of the following year, so the data is not available throughout the research period. This research uses multiple linear regression as an analysis technique. The results of the research show that the size of local governments has a positive and significant effect on the performance of local governments. This shows that improving the ability of local governments is correlated with improving governance performance. This research offers an empirical contribution to the public sector accounting literature and serves as evaluation material for local governments to improve governance and performance.

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal melalui kebijakan otonomi daerah dipahami sebagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia guna meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik di daerah (Hardiyanti & Meilansari, 2025). Kebijakan dimaksud, memberikan pemerintah daerah wewenang dengan menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya keuangan serta menjalankan fungsi pemerintahan yang menyelaraskan ciri khas serta potensi dimiliki dari setiap daerah. Implementasi otonomi daerah diharapkan mampu menopang pemerintah daerah terkait

optimasi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kinerja pemerintah daerah menggambarkan parameter utama dalam menjamin implementasi desentralisasi dengan berhasil serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Dao & Prabowo, 2025). Pada lingkup Indonesia, kinerja pemerintah daerah dievaluasi melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang menghasilkan skor kinerja sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah (Safitri et al., 2023; Dao & Prabowo, 2025). Penilaian ini dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Akuntabilitas tersebut bertujuan untuk menjamin pertanggung jawaban terhadap sejumlah kegiatan dan pemanfaatan anggaran daerah dengan memberikan transparansi serta manfaat yang optimal bagi masyarakat (Sulistiyowati et al., 2024, 2025; Sulistiyowati & Prasetyo, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan sejumlah polemic persoalan mengenai kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan data keluaran Kementerian Dalam Negeri bertajuk, "Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)" masih terdapat variasi skor kinerja antar daerah yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam wilayah Indonesia. Ditambah lagi, temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggambarkan mayoritas keluaran terkait sistem pengendalian internal maupun tidak terdapatnya kepatuhan pada perundang-undangan di berbagai administrasi daerah (Artha & Dewata, 2024; Bandiyono, 2021). Realitas tersebut menegaskan meski otonomi daerah telah berjalan, manajemen sumber daya dengan optimal serta akuntabel belum dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah dengan menyeluruh, sehingga berdampak pada belum meratanya kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.

Fenomena tersebut juga didukung oleh berbagai pemberitaan media massa mengenai masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satunya diberitakan oleh Detik.com (2025) yang menyebutkan bahwa Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta lebih transparan dalam pengelolaan aset daerah dan segera menindaklanjuti temuan BPK. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa masih terdapat ratusan aset tanah dan gedung daerah yang belum teridentifikasi dengan nilai mencapai triliunan rupiah, sehingga menunjukkan belum optimalnya tata kelola aset dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, SuaraNTB.com (2025) juga memberitakan bahwa BPK menemukan berbagai permasalahan pengelolaan anggaran di RSUP NTB dengan nilai temuan mencapai Rp247,97 miliar. Temuan tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik maupun kinerja pemerintah daerah dengan menyeluruh. Fenomena yang terjadi dalam lingkup Indonesia, memperkuat temuan yakni kualitas pengelolaan keuangan daerah dan tindak lanjut atas temuan audit BPK masih menjadi tantangan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dalam menentukan kinerja nya, terdapat sejumlah aspek yang mempengaruhi termasuk tata kelola pemerintahan yang baik maupun karakteristik ditunjukkan setiap pemerintah daerah (Andriyan & Bustami, 2021; Wahasusmiah, 2025). Salah diantara karakteristik umum dilakukan pengkajian dalam riset sektor publik yakni ukuran peran pemerintah daerah (Lestari & Lestari, 2022). Selain itu, riset di bidang organisasi menjelaskan sejumlah faktor internal berpengaruh bagi kinerja kepemimpinan, pengembangan karir, dan perilaku organisasi, di mana Sulistiyowati & Arifah (2023) menemukan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Ukuran pemerintah daerah secara luas dapat dipahami merefleksikan tingkat besaran kapabilitas dari sumber daya dimiliki termasuk aset dan anggaran daerah, dimana berpotensi meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik serta mengimplementasikan program yang membangun daerah (Andriyan & Bustami, 2021). Beberapa riset menunjukkan yakni ukuran pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, mengingat peningkatan besaran organisasi pemerintah tentu

mendorong kapasitas administratif dan fiskal yang dimiliki dalam melaksanakan berbagai program untuk membangun daerah (Pradana et al., 2022; Safitri et al., 2023).

Disamping ukuran pemerintah daerah yang menjadi indikator, tingkatan kekayaan dimiliki dinilai turut menjadi potensi faktor pengaruh bagi kinerja pemerintah daerah (Primadiva et al., 2021). Tingkat kekayaan daerah umumnya direfleksikan dengan kapabilitas pemda untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dao & Prabowo, 2025; Primadiva et al., 2021). Kemakmuran dari suatu daerah makmur seringkali ditunjukkan dengan otonomi fiskal yang lebih besar, sehingga memfasilitasi peningkatan fleksibilitas dalam alokasi anggaran untuk pertumbuhan dan layanan publik. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pertumbuhan regional, sehingga pada akhirnya meningkatkan efektivitas pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam manajemen keuangan daerah (Sedek & Kusumawati, 2024). Realitanya tingkat ketergantungan terhadap pemberian dana oleh pusat termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialami oleh mayoritas pemerintah daerah di Indonesia (Pradana et al., 2022; Primadiva et al., 2021). Ketergantungan dengan kapasitas tinggi kepada pemerintah pusat dapat menunjukkan kapabilitas fiskal mandiri yang rendah dari daerah serta dapat mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan fiskal di daerah. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan pemda terkait pengelolaan anggaran dengan maksimal sehingga dapat berdampak bagi kinerja pemerintah daerah.

Belanja modal adalah atribut lain yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah (Budiharjo et al., 2025). Belanja modal merujuk pada pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap, termasuk pengembangan infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik (Budiharjo et al., 2025). Penggunaan belanja modal yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Akibatnya, alokasi belanja modal yang lebih tinggi untuk pembangunan regional berkorelasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik.

Selain karakteristik pemerintah daerah, temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan juga dinilai sebagai parameter krusial guna menilai kualitas manajemen keuangan daerah (Dao & Prabowo, 2025). Dalam melakukan audit, BPK berorientasi untuk menguji kewajaran pelaporan kondisi finansial serta mengidentifikasi kelemahan terdapat pada sistem pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap aturan (Artha & Dewata, 2024; Bandiyono, 2021; Wahasusmiah, 2025). Jumlah temuan audit BPK sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, riset Sulistyowati & Elladevi (2025) menunjukkan bahwa budaya organisasi, sistem pengendalian internal, serta kompetensi aparatur yang memengaruhi manajemen keuangan sektor publik dengan positif, yang menegaskan pentingnya pengelolaan positif dan terorganisir disamping akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Semakin banyak keluaran audit diberikan dapat mencerminkan semakin rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah serta lemahnya sistem pengendalian internal pemda.

Berbagai riset sebelumnya telah mengkaji bagaimana karakteristik pemerintah daerah serta temuan audit memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, temuan studi dimaksud masih menunjukkan temuan variatif. Beberapa riset menemukan yakni ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, serta belanja modal berpengaruh dengan positif bagi pemerintah daerah, sementara tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat maupun temuan audit BPK memberikan pengaruh negatif untuk kinerja pemerintah daerah (Budiarto, 2019; Dao & Prabowo., 2025; Latifah & Amalia, 2022). Namun riset lain menjelaskan yakni beberapa variabel karakteristik pemerintah daerah tidak memengaruhi kinerja pemerintah daerah dengan signifikan dimana menunjukkan adanya inkonsistensi keluaran studi (Kusumarini & Respati., 2022).

Selain itu, mayoritas hasil studi terdahulu masih berfokus dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota yang menggunakan indikator kinerja yang berbeda seperti kinerja keuangan atau opini audit. Riset yang secara khusus mengkaji pemerintah daerah tingkat provinsi dengan

menggunakan indikator kinerja berupa skor EKPPD serta menggunakan data terbaru, khususnya tahun 2023 dan 2024, cenderung terbatas. Dengan demikian, penyusunan studi bertujuan untuk menganalisis Dampak atribut pemerintah daerah, seperti ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan hasil audit BPK, terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia untuk tahun 2023 dan 2024, dinilai melalui angka Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD). Riset ini memiliki pembaharuan dibandingkan riset sebelumnya, yaitu dengan memfokuskan analisis pada pemerintah daerah tingkat provinsi, menggunakan indikator kinerja berbasis skor EKPPD yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara lebih komprehensif, serta memanfaatkan data terbaru tahun 2023 dan 2024. Selain itu, riset ini mengkombinasikan variabel karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK ke dalam model riset terpadu untuk menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang elemen-elemen yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Analisis ini menggunakan data dari tahun 2023 dan 2024, karena laporan anggaran pemerintah daerah dan data angka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2025 tersedia belum dipublikasikan secara lengkap pada saat riset dilakukan. Selain itu, proses penyusunan dan audit pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) umumnya baru selesai dan dipublikasikan setelah bulan Maret tahun berikutnya sehingga data tahun 2025 belum dapat digunakan secara optimal dalam riset ini. Penyusunan kajian ditujukan untuk berkontribusi secara empiris terhadap pengembangan kepustakaan di bidang akuntansi sektor publik termasuk memberikan masukan untuk pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan maupun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Keagenan

Agency theory dipami sebagai konsep teoritis dimana memaparkan relasi kontraktual dari pihak pemberi amanah (*principal*) dan terhadap penerima amanah (*agent*) dalam menjalankan suatu tugas atau fungsi tertentu (Jensen & Meckling, 1976). Pada lingkup sektor publik, masyarakat memegang peranan utama yakni *principal* dimana mendelegasikan mandat terhadap pemerintah daerah untuk menjadi *agent* dalam pengelolaan sumber daya publik serta menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan akuntabel (Al-Faryan, 2024). Hubungan keagenan dalam pemerintahan daerah seringkali menimbulkan masalah asimetris data dengan kelengkapan informasi dimiliki pemerintah daerah dikomparasi terhadap masyarakat sebagai *principal* (Dao & Prabowo, 2025). Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik, seperti penyalahgunaan anggaran, ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja, salah satunya melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta penilaian kinerja pemerintah daerah melalui EKPPD, dalam menjamin pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan kepentingan masyarakat (Artha & Dewata, 2024). Dalam kerangka teori keagenan, atribut pemerintah daerah, termasuk ukuran, tingkat kekayaan, dan ketergantungan pada pemerintah nasional, perlu dipertimbangkan, serta alokasi belanja modal dinilai berpengaruh terhadap mekanisme pemda dalam menjalankan fungsi agen dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja. Selain itu, temuan audit BPK juga mencerminkan kualitas pengawasan terhadap perilaku agen dalam mengelola keuangan daerah.

2. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah mencerminkan kapasitas sumber daya dari daerah tersebut, baik dari sisi aset maupun anggaran. Pemerintahan lokal yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memfasilitasi pelaksanaan rencana pembangunan dan pelayanan

publik (Andriyan & Bustami, 2021). Dari sudut pandang teori keagenan (*agency theory*), pemerintah lokal berfungsi sebagai agen yang ditunjuk oleh masyarakat, sebagai prinsipal, untuk mengelola sumber daya publik secara efisien. Pemerintah lokal yang luas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan agen dalam pengelolaan sumber daya, sehingga memfasilitasi penyampaian pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas pemerintah lokal. Akibatnya, semakin besar pemerintah lokal, semakin baik kapasitasnya untuk menangani kepentingan masyarakat, sebagai tujuan utama.

Studi terdahulu menjelaskan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerjanya (Pradana dkk., 2022; Safitri dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintahan dengan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah secara signifikan memengaruhi peningkatan kinerjanya. Dengan demikian, hipotesis diajukan dalam studi yakni:

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

b. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat kemakmuran regional, yang ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Regional (PAD), menandakan kapasitas pemerintah daerah untuk secara mandiri menyelidiki potensi aliran pendapatan. Daerah yang menunjukkan PAD tinggi memiliki otonomi fiskal yang lebih besar, sehingga memungkinkan fleksibilitas anggaran yang lebih baik (Primadiva dkk., 2021). Dari perspektif teori keagenan, pemerintah daerah, sebagai agen, bertugas untuk secara efektif mengelola sumber daya yang mereka peroleh untuk memenuhi tujuan masyarakat sebagai prinsipal. Kemakmuran regional yang tinggi memberi pemerintah daerah kapasitas untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pertumbuhan regional, sehingga meningkatkan efektivitas pemerintah daerah secara keseluruhan.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Agintha, 2024; Pradana et al., 2022). Hal ini menunjukkan yakni meningkatnya kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri, tentu meningkatkan juga semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah untuk mengimplementasikan fungsi dari pemerintahan dengan efektif serta efisien. Berangkat dari kajian Pustaka dan temuan kajian telah dilakukan, dapat dipahami yakni kekayaan daerah dengan signifikan berperan dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yakni:

H2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

c. Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat menunjukkan kapasitas ketergantungan dari pemda terhadap pembiayaan termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tingginya ketergantungan tersebut dapat mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah (Pradana et al., 2022). Pada lingkup teori keagenan (*agency theory*), pemerintah daerah menjadi agen cenderung mempunyai insentif yang lebih rendah dalam mengelola sumber daya secara efisien ketika sebagian besar pendanaan berasal dari pemerintah pusat sebagai prinsipal. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), seperti kurang optimalnya pengelolaan anggaran dan rendahnya dorongan untuk meningkatkan kinerja secara mandiri.

Riset sebelumnya menjelaskan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat memengaruhi kinerja pemerintah daerah dengan negative (Latifah & Amalia, 2022). Realitas tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah, mendorong kemandirian yang rendah dalam pengambilan keputusan finansial, dimana akan

berpengaruh terhadap penurunan kinerja pemerintah daerah. Berangkat dari kajian pusaka serta keluaran studi terdahulu relevan dipahami yakni tingkat ketergantungan berpengaruh bagi kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah

d. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja modal mengacu pada investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap yang ditujukan untuk penggunaan jangka panjang, termasuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum. Alokasi belanja modal yang signifikan menunjukkan dedikasi pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan (Budiharjo dkk., 2025). Dari perspektif teori keagenan (*agency theory*), pemerintah daerah, sebagai agen, berkewajiban untuk mengelola keuangan mereka secara efisien agar selaras dengan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Alokasi belanja modal yang tepat dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, sehingga secara positif memengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Budiarto, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk belanja produktif berkorelasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Belanja modal secara signifikan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sebagaimana dibuktikan oleh kajian pustaka dan keluaran studi terdahulu, dengan begitu hipotesis yang diajukan yakni:

H4: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

e. Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Keluaran audit BPK menunjukkan terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan atas hukum maupun peraturan. Meningkatnya jumlah temuan audit menandakan memburuknya kualitas manajemen keuangan daerah (Artha & Dewata, 2024). Dari konsepsi keagenan (*agency theory*), pemerintah daerah yakni agen mengemban kewajiban terkait pengelolaan keuangan publik dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Temuan audit dapat menjadi indikator adanya masalah keagenan (*agency problem*), seperti perilaku oportunistik, penyimpangan, atau kurangnya pengendalian internal yang efektif, sehingga menunjukkan bahwa agen belum menjalankan fungsinya secara optimal.

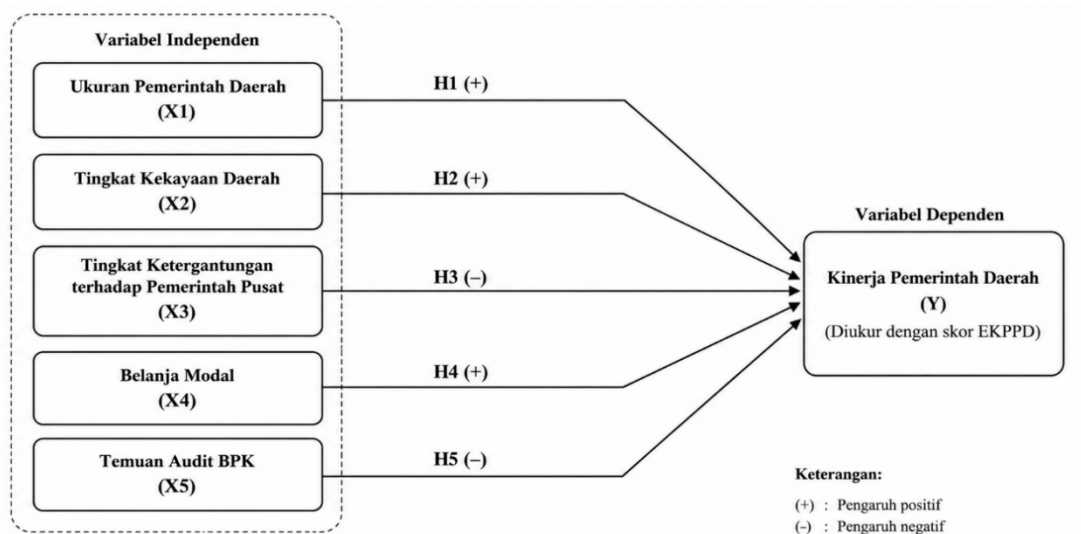
Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hasil audit BPK berdampak negatif terhadap kinerja pemerintah daerah (Dao & Prabowo, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil audit berkorelasi dengan penurunan kualitas tata kelola keuangan daerah, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa temuan audit BPK berdampak pada kinerja pemerintah daerah, berdasarkan kajian pustaka dan temuan audit studi terdahulu. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yakni:

H5: Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Kerangka Riset

Berdasarkan landasan teori maupun studi terdahulu sebagaimana dipaparkan di atas, susunan kerangka riset yang dibangun dapat menjelaskan hubungan terjal dari variabel independen terhadap dependen pada kajian penulis. Variabel independent mencakup ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, belanja modal, hingga temuan audit BPK, yang dihipotesiskan memengaruhi kinerja pemerintah daerah dan bertindak menjadi variabel dependen. Penyusunan kerangka studi ditujukan guna menggambarkan sistematis

bagaimana arah hubungan dari variabel dikaji yang diteliti. Kerangka riset pada studi, diilustrasikan dalam gambar di bawah:



Gambar 1. Kerangka Riset

Metode Riset

Populasi dan sampel

Dalam menyusun studi, penulis menggunakan data pemerintah daerah provinsi Indonesia menyeluruh dengan periode tahun 2023 dan 2024 sebagai populasi riset. Penetapan jangka waktu dimaksud 2023–2024 didasari pertimbangan tersedianya data terbaru terkait kinerja pemerintah daerah yang dinilai melalui angka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Teknik pemilihan sampel untuk kajian penulis dengan menerapkan pendekatan *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel dengan melihat sejumlah ketentuan terkait guna menyasar sasaran riset (Sugiyono, 2022).

Berikut merupakan daftar ketentuan untuk menentukan sampel riset, diantaranya:

1. Pemerintah daerah provinsi yang memiliki data lengkap terkait skor EKPPD tahun 2023 dan 2024.
2. Pemerintah daerah provinsi yang menyajikan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 yang telah diaudit.
3. Pemerintah daerah provinsi yang memiliki data lengkap terkait variabel riset, yaitu total aset, PAD, dana transfer pusat, total pendapatan, belanja modal, total belanja, serta temuan audit BPK tahun 2023 dan 2024.

Variabel Riset dan Pengukurannya

Penyusunan riset mengaplikasikan variabel dependen dengan dan lima variabel independen. Untuk variabel terikat dituju yakni kinerja pemerintah daerah dengan pengukuran berbasis angka EKPPD, sementara variabel bebasnya mencakup ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan audit BPK.

Tabel 1. Variabel dan Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Dependen		
Kinerja Pemerintah Daerah	SK	Skor EKPPD (data numerik)
Variabel Independen		
Ukuran Pemerintah Daerah	LnTA	Logaritma natural total aset (Ln Total Aset)
Tingkat Kekayaan Daerah	TKD	PAD / Total Pendapatan
Tingkat Ketergantungan Pusat	TKP	Dana Transfer / Total Pendapatan

Belanja Modal	BM	Belanja Modal / Total Belanja
Temuan Audit BPK	TM	Jumlah temuan audit dalam LHP BPK

Jenis dan Sumber Data

Dalam mendukung riset, penulis mengaplikasikan jenis data sekunder yang didapatkan secara resmi dari sejumlah sumber. Perolehan data total aset berdasarkan pelaporan posisi keuangan (neraca) pemerintah daerah provinsi tahun 2023 hingga 2024. Data PAD, dana transfer pusat, dan jumlah menyeluruh dari pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data belanja modal dan total belanja daerah juga diperoleh dari LRA tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, data temuan audit diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan finansial pemerintah daerah provinsi. Data skor EKPPD didapatkan bersumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2023 dan 2024.

Model Riset

Penulisan riset menerapkan metodologi kuantitatif berbasis teknik regresi linier berganda guna menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini dipilih karena variabel dependen berupa skor EKPPD berbentuk data numerik (interval), sehingga memenuhi asumsi penggunaan regresi linear. Pemodelan yang diaplikasikan bertujuan guna mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, belanja modal, serta temuan audit BPK bagi kinerja pemerintah daerah provinsi.

Adapun formulasi model regresi pada riset penulis yakni:

$$SK = \alpha + \beta_1 LnTA + \beta_2 TKD + \beta_3 TKP + \beta_4 BM + \beta_5 TM + \varepsilon$$

Keterangan:

- SK = Skor kinerja pemerintah daerah (EKPPD)
- α = Konstanta
- β_1 – β_5 = Koefisien regresi
- LnTA = Ukuran pemerintah daerah
- TKD = Tingkat kekayaan daerah
- TKP = Tingkat ketergantungan pusat
- BM = Belanja modal
- TM = Temuan audit BPK
- ε = Error term

Teknik Analisis Data

Riset disusun dengan menggunakan alat statistik untuk analisis data guna meneliti hubungan antara variabel independen dan dependen. Fase analisis dimulai dengan statistik deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dasar tentang sifat-sifat data riset, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar dari setiap variabel (Ghazali, 2018). Tahap berikutnya, pengujian asumsi klasik diterapkan, dengan meliputi uji normalitas guna mengidentifikasi data digunakan dalam riset terdistribusi dengan normal, uji multikolinearitas guna memverifikasi tidak terdapat korelasi signifikan antar variabel independen, uji heteroskedastisitas guna mengevaluasi kesamaan varians residual, dan uji autokorelasi untuk mengidentifikasi korelasi antar residual dalam model regresi.

Setelah memenuhi persyaratan asumsi klasik, analisa data riset dilanjutkan pada tahap pemodelan regresi linier berganda, ditujukan guna menguji ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, ketergantungan terhadap pusat, belanja modal, serta temuan audit BPK memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pengujian diaplikasikan dengan memanfaatkan koefisien determinasi (R^2) guna mengidentifikasi kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, uji F untuk menganalisis dampak simultan variabel independen, dan uji t untuk menyelidiki pengaruh individual

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Temuan analisis ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan korelasi antar variabel dalam riset.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menyusun riset, penulis menggunakan data sekunder bersumber dari sejumlah media resmi, yakni laporan keuangan pemerintah daerah provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2023 dan 2024. Populasi yang ditetapkan dalam riset mencakup pemerintah provinsi di Indonesia dengan menyeluruh pada rentang periode tahun 2023–2024, yang tercatat memiliki 38 provinsi tersebar sebagai akibat dari pemekaran wilayah, khususnya di wilayah Papua. Namun demikian, tidak seluruh provinsi hasil pemekaran tersebut memiliki ketersediaan data yang lengkap, terutama terkait laporan keuangan yang telah diaudit, data LHP BPK, serta skor EKPPD tahun 2023 dan 2024. Keterbatasan ini disebabkan oleh status administratif provinsi baru yang masih dalam tahap penyesuaian kelembagaan dan penulisan laporan keuangan secara penuh.

Berangkat dari kondisi di atas, penulisa riset mengaplikasikan pendekatan *purposive sampling* sebagai strategi dalam memilih sampel yang mempertimbangkan sejumlah ketentuan relevan terhadap sasaran riset. Berikut merupakan sejumlah ketentuan dimaksud dengan memiliki data lengkap terkait laporan keuangan, LHP BPK, serta skor EKPPD tahun 2023 dan 2024. Melalui penilaian ketentuan diterapkan, disaring keluaran sampel dari jumlah provinsi yang telah memenuhi persyaratan yaitu sejumlah 34 provinsi.

Tabel 2. Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Jumlah total pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2023- 2024 (38 x 2)	76
2	Pemerintah provinsi yang tidak memiliki data lengkap (laporan keuangan, LHP BPK, dan EKPPD)	(8)
	Jumlah pemerintah provinsi yang memenuhi syarat sampel	68
	Jumlah sampel riset	68

Setelah menentukan sampel riset, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan sifat-sifat data yang digunakan dalam riset. Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku dari setiap variabel riset, sehingga memudahkan pemahaman tentang distribusi data dan status keseluruhan variabel yang diteliti.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Daerah	68	0.17	13.48	5.8408	3.30189
Tingkat Kekayaan Daerah	68	0.00	2.99	0.4472	0.41564
Tingkat Ketergantungan Daerah	68	0.00	1.99	0.6067	0.25558
Belanja Modal	68	0.00	0.53	0.0672	0.08111
Temuan Audit	68	5.00	107.00	25.2059	24.46170
Kinerja Pemerintah	68	0.00	367.00	142.9684	151.21142

Sumber: data SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel di atas, semua variabel riset terdiri dari total 68 titik data (N), yang bersumber dari data pemerintah provinsi untuk tahun 2023 dan 2024. Variabel ukuran daerah berkisar dari minimum 0,17 hingga maksimum 13,48, dengan rata-rata 5,8408 dan simpangan baku 3,30189. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam ukuran aset antar pemerintah provinsi di Indonesia. Variabel tingkat kekayaan daerah berkisar dari minimum 0,00 hingga maksimum 2,99, dengan rata-rata 0,4472. Data menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah

(PPN) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan berbeda antar provinsi. Simpangan baku sebesar 0,41564 menunjukkan adanya variasi dalam tingkat otonomi fiskal antar daerah.

Variabel tingkat ketergantungan daerah berkisar dari minimum 0,00 hingga maksimum 1,99, dengan rata-rata 0,6067. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemerintahan daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Deviasi standar sebesar 0,25558 menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam tingkat ketergantungan antar provinsi. Variabel pengeluaran modal berkisar dari minimum 0,00 hingga maksimum 0,53, dengan rata-rata 0,0672. Angka ini menunjukkan bahwa rasio pengeluaran modal terhadap total pengeluaran daerah masih relatif kecil. Deviasi standar sebesar 0,08111 menunjukkan adanya variabilitas dalam distribusi pengeluaran modal di antara pemerintah daerah.

Variabel hasil audit memiliki nilai minimum 5,00, maksimum 107,00, dan rata-rata 25,2059. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas hasil audit BPK di pemerintahan provinsi masih sangat tidak konsisten. Deviasi standar sebesar 24,46170 mencerminkan perbedaan kualitas manajemen keuangan antar daerah. Variabel kinerja pemerintah berkisar dari minimum 0,00 hingga maksimum 367,00, dengan rata-rata 142,9684. Deviasi standar sebesar 151,21142 menunjukkan bahwa tingkat kinerja pemerintah daerah di berbagai provinsi menunjukkan variabilitas yang cukup besar selama periode studi 2023–2024.

Pasca analisa secara statistik deskriptif dilaksanakan, menuju tahapan berikutnya yakni melaksanakan pengujian asumsi klasik, termasuk penilaian normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Studi ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S Test)* Satu Sampel untuk menilai normalitas.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
N	68
Mean	0.0000000
Std. Deviation	90.25939496
Test Statistic	0.094
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber: data SPSS yang diolah, 2026

Merujuk keluaran pengujian normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* yang menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang menunjukkan normalitas. Angka ini di atas tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa data residual dalam riset ini terdistribusi secara normal. Akibatnya, asumsi normalitas dalam regresi telah terpenuhi, sehingga model tersebut sesuai untuk riset lebih lanjut.

Setelah memenuhi uji normalitas, penilaian multikolinearitas dilakukan untuk memastikan adanya hubungan yang signifikan di antara variabel independen dalam model regresi. Penilaian multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Model regresi dianggap bergantung pada multikolinearitas jika nilai *tolerance* melebihi 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Ukuran Daerah	0.909	1.100
Tingkat Kekayaan Daerah	0.722	1.385
Tingkat Ketergantungan Daerah	0.684	1.462
Belanja Modal	0.911	1.098
Temuan Audit	0.872	1.147

Sumber: data SPSS yang diolah, 2026

Berdasarkan keluaran pengujian multikolinearitas, semua variabel independen menunjukkan nilai *tolerance* melebihi 0,10. Selain itu, semua nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi substansial antar variabel independen dalam model regresi. Akibatnya, model regresi dalam riset ini dianggap bebas dari multikolinearitas dan sesuai untuk analisis selanjutnya.

Setelah konfirmasi multikolinearitas, tahap selanjutnya adalah melakukan uji heteroskedastisitas untuk menilai ketidakseimbangan varians residual dalam model regresi. Riset ini menggunakan uji Glejser untuk heteroskedastisitas, yang melibatkan regresi nilai absolut residual (*Abs_RES*) terhadap variabel independen. Kriteria pengujian menunjukkan bahwa jika nilai signifikansi setiap variabel independen melebihi 0,05, dapat diasumsikan bahwa heteroskedastisitas tidak ada dalam model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Ukuran Daerah	0.064
Tingkat Kekayaan Daerah	0.332
Tingkat Ketergantungan Daerah	0.672
Belanja Modal	0.226
Temuan Audit	0.101

Sumber: data SPSS yang diolah, 2026

Keluaran pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05. Ini menandakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Akibatnya, model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas. Artinya, model regresi tersebut dinilai sesuai untuk analisis lebih lanjut.

Riset ini menerapkan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis guna menilai dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menilai nilai signifikansi (Sig.) pada ambang batas $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi di bawah 0,05, hipotesis diterima; jika nilai signifikansi melebihi 0,05, hipotesis ditolak.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	267.808	43.691		6.130	0.000
Ukuran Daerah	26.110	3.642	0.570	7.170	0.000
Tingkat Kekayaan Daerah	1.794	32.452	0.005	0.055	0.956
Tingkat Ketergantungan Daerah	-60.187	54.225	-0.102	-1.110	0.271
Belanja Modal	-21.099	148.061	-0.011	-0.142	0.887
Temuan Audit	-2.571	0.502	-0.416	-5.121	0.000

Sumber: data SPSS yang diolah, 2026

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah memberikan dampak positif dan substansial terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan nilai signifikansi 0,000. Faktor tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan belanja modal tidak memberikan pengaruh substansial terhadap kinerja pemerintah daerah, karena nilai signifikansinya melebihi 0,05. Variabel hasil audit memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil riset menunjukkan bahwa peningkatan ukuran daerah berkorelasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah, sedangkan jumlah temuan audit yang lebih banyak dikaitkan dengan penurunan kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Temuan riset menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000, yang kurang dari 0,05. Akibatnya, premis bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerjanya terbukti benar. Dari sudut pandang teori keagenan, pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang

ditunjuk oleh masyarakat sebagai prinsipal untuk mengelola sumber daya publik secara efisien. Pemerintah daerah yang lebih luas biasanya memiliki kapasitas sumber daya yang lebih besar, meliputi aset, anggaran, dan kompetensi administratif, sehingga memfasilitasi pelaksanaan layanan publik dan pertumbuhan regional yang lebih efektif. Besarnya aset yang dimiliki pemerintah daerah juga menunjukkan kapasitas mereka untuk menyediakan struktur dan infrastruktur yang mendukung layanan publik. Selain itu, wilayah yang luas biasanya memiliki kapasitas anggaran yang lebih unggul, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola daerah. Hasil riset ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran pemerintah daerah berkorelasi dengan peningkatan kinerja. Temuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Pradana dkk. (2022) dan Safitri dkk. (2023), yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerjanya. Meskipun demikian, temuan riset ini bertentangan dengan temuan Kusumarini dan Respati (2022), yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Perbedaan hasil menunjukkan bahwa dampak ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja tetap bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya di setiap daerah.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Temuan riset menunjukkan bahwa tingkat kekayaan regional tidak secara substansial memengaruhi kinerja pemerintah daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,956, melebihi ambang batas 0,05. Akibatnya, teori yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan regional secara positif memengaruhi kinerja pemerintah daerah tetap tidak terbukti. Daerah yang dicirikan oleh tingkat kekayaan yang tinggi diperkirakan memiliki otonomi anggaran yang lebih besar, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik dan pertumbuhan regional. Dari sudut pandang teori keagenan, pemerintah daerah, yang bertindak sebagai agen, berkewajiban untuk mengelola Pendapatan Milik Daerah (PAD) secara efisien untuk memenuhi tujuan masyarakat sebagai prinsipal. Namun demikian, temuan riset ini menunjukkan bahwa PAD yang tinggi tidak secara inheren mengarah pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh manajemen PAD yang tidak memadai, alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran, dan dominasi penggunaan anggaran untuk pengeluaran rutin dibandingkan pengeluaran produktif. Selain itu, besarnya PAD tidak secara konsisten menunjukkan efektivitas alokasi anggaran dalam meningkatkan layanan publik. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan uang tidak selalu berkorelasi dengan kemampuannya dalam pengelolaan sumber daya. Keluaran riset ini dinilai tidak relevan terhadap kajian dari Agintha (2024) serta Pradana et al., (2022) Tingkat kemakmuran regional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan ini sesuai dengan beberapa riset yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal tidak secara konsisten berkorelasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Temuan studi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak secara substansial memengaruhi kinerja pemerintahan daerah, sebagaimana dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,271, yang melebihi ambang batas 0,05. Akibatnya, hipotesis bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan daerah tetap tidak terbukti. Menurut teori keagenan, ketergantungan yang berlebihan pada pendanaan transfer pemerintah pusat dapat mengurangi insentif pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mengelola sumber daya secara efisien. Dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada dasarnya diberikan guna memfasilitasi pemerintahan daerah dan mendorong pembangunan yang merata. Meskipun demikian, temuan studi ini menunjukkan bahwa volume dana transfer dari pemerintah pusat tidak secara langsung memengaruhi kinerja pemerintahan daerah. Realitas tersebut terjadi dikarenakan penggunaan dana transfer masih lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan administratif dan operasional dibandingkan program yang berorientasi pada peningkatan

pelayanan publik. Ditambah lagi, aspek ketergantungan fiskal cukup signifikan belum tentu mencerminkan rendahnya kinerja pemerintah daerah apabila dana transfer tersebut mampu dimanfaatkan secara optimal. Temuan riset dinilai tidak relevan terhadap kajian dari Latifah dan Amalia (2022) dimana menyatakan tingkat ketergantungan memengaruhi kinerja pemerintah daerah dengan negatif; meski keluaran studi menggambarkan adanya hubungan ketergantungan fiskal dengan kinerja masih bersifat inkonsisten.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Temuan riset menunjukkan bahwa belanja modal tidak secara signifikan memengaruhi kinerja pemerintah daerah, sebagaimana dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,887, melebihi ambang batas 0,05. Akibatnya, premis yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah tetap tidak terbukti. Belanja modal, secara teori, mengacu pada pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur, fasilitas umum, dan aset tetap lainnya yang meningkatkan pelayanan publik. Menurut teori keagenan, pemerintah daerah, yang bertindak sebagai agen, diharapkan mengalokasikan belanja modal secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertindak sebagai prinsipal. Namun demikian, temuan riset ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang substansial tidak secara inheren meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh investasi modal yang tidak efisien, keterlambatan penyelesaian proyek, dan perbedaan antara alokasi anggaran dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keuntungan belanja modal biasanya bersifat jangka panjang, sehingga pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah tidak langsung terlihat sepanjang periode riset. Temuan riset ini bertentangan dengan riset Budiarto (2019), yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, temuan studi ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal harus diselaraskan dengan administrasi yang kompeten dan pemanfaatan anggaran yang tepat untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Temuan riset menjelaskan yakni temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan nilai signifikansi 0,000, yang berada di bawah 0,05. Akibatnya, anggapan bahwa temuan audit BPK berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah daerah terbukti benar. Dari sudut pandang teori keagenan, temuan audit mengungkapkan kekurangan dalam sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan, yang menandakan adanya masalah keagenan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Meningkatnya jumlah hasil audit menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang memadai dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan mereka dengan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini telah menyebabkan penurunan efektivitas pemerintah daerah. Temuan riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Dao dan Prabowo (2025) dan Artha dan Dewata (2024), yang menunjukkan bahwa temuan audit berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menggarisbawahi bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan penentu penting efektivitas pemerintah daerah.

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan riset penulis bertujuan untuk meneliti dampak atribut pemerintah daerah, seperti ukuran, kemakmuran daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2023–2024. Temuan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya dan aset pemerintah daerah berkorelasi dengan peningkatan kemampuan kinerja. Secara bersamaan, kemakmuran daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan investasi modal tidak secara

substansial memengaruhi efektivitas pemerintah daerah. Hasil riset menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah (PAD), dana transfer pusat yang signifikan, dan alokasi belanja modal tidak secara inheren meningkatkan kinerja pemerintah daerah tanpa manajemen anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, temuan audit BPK menunjukkan dampak yang merugikan dan substansial terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil audit berkorelasi dengan penurunan kinerja pemerintah daerah. Temuan audit menunjukkan kekurangan dalam pengendalian internal dan pelanggaran peraturan dan regulasi, yang berpotensi membahayakan integritas pemerintahan daerah. Berdasarkan temuan riset, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan untuk mengurangi temuan audit BPK. Selain itu, pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi sumber daya dan manajemen fiskal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas administrasi daerah. Riset ini bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris pada literatur akuntansi sektor publik dan menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola daerah.

Daftar Pustaka

- Agintha, N. D. (2024). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 42–54.
- Al-Faryan, M. A. S. (2024). Agency theory, corporate governance and corruption: an integrative literature review approach. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2337893>
- Andriyan, T., & Bustami, E. (2021). ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKATAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 3(7), 44–54.
- Artha, S., & Dewata, E. (2024). Determinants of Factors Influenced the Follow-up of BPK RI Audit Recommendations. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.
- Bandiyono, A. (2021). Good Government Governance in The Internal Control System and Audit Opinion. *Jurnal Akuntansi*, XXV(01), 120–137.
- Budiarto, D. S. (2019). Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? riset pada kabupaten di jawa tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Budiharjo, R., Hariani, S., & Sagita, A. (2025). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Ukuran Pemerintah Daerah , Belanja Modal , Belanja Rutin , dan Indeks Reformasi Birokrasi Pendahuluan. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 39–46. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3712>
- Dao, R. G. A., & Prabowo, T. J. W. (2025). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(2012), 1–14.
- Detik.com. (2025). *Fraksi NasDem DPRD DKI minta Pemprov transparan kelola aset dan tindak lanjuti temuan BPK*. Diakses dari <https://news.detik.com/>
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiyanti, K. A., & Meilansari, S. (2025). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Faktor Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3), 2203–2225.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Springer.
- Kusumarini, K. Y. M., & Respati, N. W. (2022). DETERMINANTS OF THE LEVEL OF COMPLETION

FOLLOWING UP RECOMMENDATIONS ON THE AUDIT RESULTS OF BPK RI TO LOCAL GOVERNMENTS. *SIMAK*, 18(02), 273–286.

- Latifah, I. A., & Amalia, D. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Keuangan. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(5), 735–743.
- Lestari, M. M., & Lestari, T. (2022). Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6, 3553–3565.
- Pradana, A., Sunardi, & Fahmi, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 119–128.
- Primadiva, P. P., Rosdini, D., & Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299–310.
- Safitri, R. H., Kalsum, U., & Pratiwi, T. S. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah , dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(13), 219–230.
- Sedek, S. C. B. T., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Leverage , Tingkat Kekayaan Daerah , Tingkat Ketergantungan pada Pusat , Temuan Audit BPK , Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 9081–9100.
- SuaraNTB.com. (2025). *BPK temukan permasalahan pengelolaan anggaran RSUP NTB mencapai Rp247,97 miliar*. Diakses dari <https://www.suarantb.com/>
- Sugiyono. (2022). *Metode Riset Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, A., & Arifah, A. N. (2023). The influence of transformational leadership , career development , and Organizational Citizenship Behavior on employee performance. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 11(3), 345–352.
- Sulistiyowati, A., & Elladevi, A. (2025). Pengaruh budaya organisasi, sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa. *JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING*, 21(2), 16–30.
- Sulistiyowati, A., & Prasetyo, A. W. (2025). Akuntabilitas Dana Desa: Kajian Terhadap Peran Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi Aparatur Desa. *Jurnal Akunida*, 11(1), 16–28.
- Sulistiyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 866–873.
- Sulistiyowati, A., Wahyuningsih, A., Indani, F. T., Riskanita, D., & Elladevi, A. (2025). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan , Sistem Pencatatan Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *E-Journal Al-Dzahab*, 06(02), 239–250.
- Wahasumiah, R. (2025). DETERMINAN KARATERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *JEMBATAN*, 10(1), 97–103.